

BAB IV
KONSEP KEPEMIMPINAN DI DALAM NEGARA UTAMA
AL-FĀRĀBĪ

A. Konsep Kepemimpinan pada Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah) Al-Fārābī

Al-Fārābī mungkin merupakan pemikir pertama yang berpendapat bahwa manusia tidak sama satu sama lain, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor iklim dan lingkungan tempat mereka hidup, di wilayah yang amat panas, amat dingin, dan sedang, juga faktor makanan. Menurut al-Fārābī, faktor-faktor tersebut banyak berpengaruh dalam pembentukan watak, pola pikir, perilaku orientasi atau kecenderungan, dan adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak sebagaimana Plato, al-Fārābī melepaskan harapan untuk dapat mewujudkan persamaan, kesatuan, dan keseragaman di antara umat manusia.¹

Al-Fārābī berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Manusia, menurut al-Fārābī, bersifat sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Manusia hidup bermasyarakat dan

¹Munawir Sjadzili, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Perss 1993), h. 51.

bantu-membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan. Sifat dasar inilah yang mendorong manusia hidup bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat menurutnya, terbagi menjadi dua macam, yakni masyarakat sempurna dan masyarakat tidak sempurna.²

Masyarakat yang sempurna, menurut al-Fārābī, terdapat tiga macam masyarakat yang sempurna: masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang, dan masyarakat sempurna kecil. Adapun masyarakat sempurna besar adalah golongan gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan membantu serta kerjasama. Masyarakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah dari bumi ini. Sedangkan masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota. Atau dengan nama lain, masyarakat sempurna besar adalah perserikatan bangsa-bangsa, masyarakat sempurna sedang adalah negara nasional, dan masyarakat sempurna kecil adalah negara-kota.³

Sementara itu, masyarakat sempurna kecil, seperti masyarakat dalam satu keluarga atau masyarakat se-desa. Masyarakat yang terbaik

²Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, (Al-Atruk: Al Maktabah Al-Azhar, 1234 H /1906 M). Cet ke- 1, h. 88.

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,....., h. 51-52.

adalah warga masyarakat yang bekerja sama, saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Masyarakat seperti ini di sebut dengan masyarakat utama.⁴

Sebagaimana Plato dan Aristoteles, al-Fārābī berpendapat, diantara tiga macam masyarakat sempurna tersebut maka negara-kota merupakan sistem atau pola politik yang terbaik dan terunggul. Beberapa pengamat sejarah ilmu politik Islam menganggap aneh pendapat al-Fārābī itu, oleh karena pada waktu itu dia hidup pada zaman di kala Islam telah terbagi-bagi menjadi semacam negara-negara nasional, yang masing-masing terdiri dari banyak kota dan desa serta berwilayah luas. Tetapi al-Fārābī tidak seorang diri dalam hal ini. Aristoteles juga menganggap bahwa negara-kota merupakan kesatuan politik yang terbaik di Yunani meskipun waktu itu Yunani sudah menjadi daerah jajahan Macedonia dan sistem negara-kota sudah tidak berfungsi lagi. Pendapat al-Fārābī ini dianggap sebagai bukti bahwa dalam idealisasi pola politik dia tidak menghiraukan kenyataan-kenyataan politik dimana dia masanya hidup.⁵

Adapun masyarakat-masyarakat yang tidak atau belum sempurna menurut, al-Fārābī, adalah penghidupan sosial di tingkat

⁴ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 83.

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara,.....*, h. 52.

desa, kampung, lorong, dan keluarga; dan diantara tiga bentuk pergaulan yang tidak atau belum sempurna itu. Maka kehidupan sosial di dalam rumah atau keluarga merupakan bagian dari masyarakat lorong, masyarakat lorong merupakan bagian dari masyarakat kampung, dan masyarakat kampung merupakan bagian dari masyarakat negara-kota. Hanya bedanya, kampung merupakan bagian dari negara-kota, sedangkan desa hanya merupakan pelengkap untuk melayani kebutuhan negara atau kota. Tampaknya al-Fārābī menganggap bahwa tiga unit pergaulan sosial tersebut tidak merupakan masyarakat-masyarakat yang sempurna karena tidak cukup lengkap bersewasembada dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya. Baik kebutuhan ekonomi, sosial, budaya maupun spritual.⁶

Seiring dengan pendapat bahwa dari tiga masyarakat sempurna itu, masyarakat sempurna kecil atau negara-kota merupakan kesatuan politik yang terbaik, maka pusat perhatian al-Fārābī adalah di sekitar negara-kota, yang untuk selanjutnya kita sebut saja negara. Menurut al-Fārābī terdapat macam-macam negara. Di satu pihak terdapat negara yang utama, dan di lain pihak, sebagai kebalikan dari negara yang utama itu, terdapat negara yang bodoh, negara yang rusak, negara yang

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,..., h. 53

sesat, negara yang merosot, serta “rumput-rumput jahat”. Negara yang utama atau bahagia bagi al-Fārābī ibarat tubuh manusia yang utuh dan sehat, yang semua organ dan anggota badannya bekerja bersama sesuai dengan tugas masing-masing, yang terkoordinasi rapi demi kesempurnaan hidup tubuh itu dan penjagaan akan kesehatannya. Tubuh manusia mempunyai sejumlah organ atau anggota badan dengan berbagai fungsi yang berbeda satu dari yang lain, dengan kadar kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama, dan dari organ yang banyak itu terdapat satu organ pokok dan paling penting, yakni jantung, dan beberapa organ lain yang tingkat kepentingannya bagi tubuh manusia hampir sama dengan jantung, dan yang bekerja sesuai dengan kodrat masing-masing membantu jantung. Organ-organ ini, bersama-sama jantung, dilihat dari segi pentingnya menduduki peringkat pertama.

Di luar itu terdapat sekelompok organ lain yang kerjanya membantu dan melayani organ-organ pendukung jantung, dan organ-organ ini berada pada peringkat kedua. Kemudian terdapat sekelompok organ lain lagi, yang tugasnya melayani organ-organ peringkat kedua tadi, dan demikian seterusnya sampai kepada anggota-anggota badan yang tugasnya hanya melayani anggota-anggota tubuh yang lain dan

tidak dilayani. Menurut al-Fārābī, demikian pulalah halnya dengan negara. Ia mempunyai warga-warga dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lain. Di antara mereka terdapat seorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati martabat kepala dan masing-masing memiliki bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijaksanaan kepala. Mereka ini bersama-sama si kepala, termasuk peringkat pertama. Di bawah mereka terdapat sekelompok warga dan tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga-warga peringkat pertama tadi dan kelompok ini berada pada peringkat atau kelas dua. Kemudian di bawah mereka terdapat kelompok lain lagi yang bertugas membantu kelas yang di atasnya, dan seterusnya sampai kepada kelas terakhir dan terendah yang terdiri dari warga-warga yang tugasnya dalam negara itu hanya melayani kelas-kelas yang lain, dan mereka sendiri tidak dilayani oleh siapa pun.⁷

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan bahwa menurut Plato warga negara itu terbagi dalam tiga kelas atau tiga peringkat: kelas pertama dan tertinggi terdiri dari pemimpin negara yang mempunyai otoritas dan kewenangan memerintah serta mengelola negara; kelas

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,....., h. 53.

kedua terdiri dari angkatan bersenjata yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara, baik terhadap rongrongan dari dalam negeri sendiri maupun terhadap serangan dari luar, kelas ketiga, dan yang terendah, terdiri dari pandai besi, pedagang dan petani, atau tegasnya rakyat jelata, yang bertugas memproduksi segala kebutuhan materi yang diperlukan oleh negara. Menurut Plato, keadilan akan tercipta kalau anggota masing-masing kelas mengerjakan tugasnya tanpa mencampuri tugas kelas-kelas yang lain. Selain dalam keadaan yang luar biasa, tidak dibenarkan terjadinya mobilitas vertikal antara tiga kelas tersebut.⁸

Negara utama telah disinyalkan bahwa al-Fārābī hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sultan Saif Al-Daulah. Berat dugaan bahwa filsafat negara utama yang ia cetuskan ini erat kaitannya dengan situasi yang sedang berkembang. Ada benarnya pendapat Zainal Abidin Ahmad yang mengatakan bahwa latar belakang lahirnya filsafat al-Fārābī ini di sebabkan terjadinya kegoncangan politik pada Daulat Bani Abbas di bawah tekanan para diktator di zaman Khalifah Al-Radi (322-329h/934-940 M), Mutaqqi (329-333h/ 940-944 m) dan Mustakfi (333-334h / 944-945 m). Dengan istilah lain, meminjam

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,....., h. 54.

istilah Guillaum, sikap para penguasa Baghdad lebih tepat di sebut sebagai raja ketimbang khalifah.⁹

Kendatipun al-Fārābī tidak pernah mengaku jabatan resmi dalam satu pemerintahan, bukan berarti pemikiran filsafat yang ia luncurkan ini bersifat khayalan semata. Perlu dipahami bahwa seorang filosof belum akan merasa puas dalam membicarakan sesuatu sebelum sampai pada hakikatnya, yakni dasar segala dasar. Maka, demikian juga dengan filsafat pemerintahan ini, ia maksudkan bukan sekedar berfilsafat atau teori untuk teori, melainkan pada hakikatnya adalah agar manusia hidup dalam satu pemerintahan untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Atas dasar ini pula kiranya Fakhuri berkesimpulan bahwa tujuan utama filsafat pemerintahan al-Fārābī adalah kebahagiaan hidup manusia. Pada pihak lain, persahabatan yang ia jalin, bahkan ia tinggal di istana Sultan Hamdan dan sebelumnya ia sering berpindah-pindah tempat dari satu wilayah ke wilayah lainnya, cukup memberikan inspirasi dalam menyusun teorinya.¹⁰

Melalui bukunya yang fundamental *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilah*, al-Fārābī membagi negara atau pemerintahan menjadi negara (kota) utama (*Al-Madīnah Al-Fāḍilah*), negara jahil (*Al-Madīnah Al-*

⁹Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*,..., h. 81.

¹⁰Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*,..., h. 82.

Jahīlīah), negara sesat (*Al-Madīnah Al-Dhālah*), negara fasik (*Al-Madīnah Al-Fasiqah*), dan negara berubah (*Al-Madīnah al-Mutabadīlah*). Akan tetapi, bahasan al-Fārābī lebih fokus pada negara utama.¹¹

Negara utama, sebagai satu masyarakat yang sempurna (*Al-Mujtami' Al-Kāmilah*), dalam arti masyarakat yang sudah lengkap bagian-bagiannya, diibaratkan oleh al-Fārābī. Sebagai organisme tubuh manusia dengan anggota yang lengkap. Masing-masing organ tubuh harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Apabila satu organ tubuh sakit, organ tubuh yang lain akan merasakan penderitaan dan akan menjaganya. Demikian pula anggota masyarakat negara utama, yang terdiri dari warga yang berbeda kemampuan dan fungsinya, hidup saling membantu atau dengan kata lain senasib dan sepenanggungan. Masing-masing mereka harus di berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan spesialis mereka. Fungsi utama dalam filsafat politik atau pemerintahan al-Fārābī.¹²

Memang ada benarnya bahwa dalam menetapkan kriteria sifat kepala pemerintahan al-Fārābī terpengaruh oleh filosof kondang dari Yunani yaitu Plato. Akan tetapi, pada dasarnya terdapat perbedaan yang

¹¹Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*,..., h. 83

¹²Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*,..., h. 84.

mendasar antara mereka. Pengarang buku *republik* ini, Plato, menekankan kepala pemerintahan larut dalam alam kejasmanian semata, sementara pengarang *Ārā' Ahl Al-Madīnah Al-Fāḍilahini*, al-Fārābī selain menekankan tugas kepala negara dalam alam kejasmanian, juga lebih menekankan hidup dalam alam spiritual. Selain itu, ia tambahkan bahwa kepala negara harus berhubungan dengan akal kesepuluh. Agaknya tepat sekali istilah yang dikemukakan De Boer, al-Fārābī adalah Plato dalam novel mantel Nabi Muhammad.

Bagi al-Fārābī pemimpin utama ialah pemegang otoritas utama yang tidak mungkin di pegang oleh pimpinan lain. Demikian pula pimpinan utama dalam negara utama, tidak mungkin dipegang oleh pemimpin pemimpin lain di atas atau di bawahnya adalah yang menjadi panutan bagi pemimpin lain dalam segala hal, dan di tangan dialah segala persoalan persoalan negara bermuara, dia adalah orang yang paling sempurna diantara yang lain.¹³

Ada dugaan sementara penulis bahwa teori al-Fārābī tentang kepala pemerintahan dipengaruhi oleh ajaran Syi'ah. Anggapan ini sekalipun benar, namun tidak sepenuhnya memegang prinsip ajaran Syi'ah tersebut. Bagi Syi'ah kepala pemerintahan yang disebut imam,

¹³ Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-fārābi dan Khomaeni*, ..., h.88.

tidak dipilih oleh rakyat, ia merupakan hak *Ahli Al-Bait* (keturunan nabi) secara turun-menurun dari bapak ke anak, seterusnya ke cucu dan demikian seterusnya. Penentuan pengganti imam ini adalah secara limpahan (*Al-faidh*), yang oleh Syi'ah disebut wasiat (*Al-Washi*). Berbeda dengan Syi'ah, bagi al-Fārābī, seperti telah dikemukakan, kepala pemerintahan itu dipilih oleh rakyat dari warga yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun amat disayangkan, penulis belum menentukan rujukan tentang cara pemilihan yang dikehendaki al-Fārābī.¹⁴

Telah disebutkan bahwa Dinasti Hamdan adalah penganut aliran Syi'ah, namun ia dapat menggalang hubungan baik dengan Dinasti Bani Abbas, penganut aliran Sunni. Hal ini tentu saja tidak dapat dilupakan pengaruh filsafat pemerintahan al-Fārābī, ilmuwan terkemuka istana, sebagai sahabat Sultan Saif al-Daulah dan orang kesayangannya. Sekiranya buah pemikiran al-Fārābī ini tidak di terima sultan, tentu saja persahabatan antara mereka sudah lama sirna.¹⁵

Sebenarnya pengaruh yang lebih dominan terhadap filsafat pemerintahan al-Fārābī datang dari Islam itu sendiri. Seperti ia

¹⁴Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*,..., h. 86.

¹⁵Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*,..., h. 86.

membandingkan antara negara dengan tubuh manusia, yang hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ حِمَارُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Dari Ibnu Abdillah Nu'man Ibnu Basyir, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, *"Apa yang halal itu jelas dan apa yang melanggar hukum sudah jelas, dan di antara keduanya ada keraguan tentang banyak orang yang tidak tahu. Dengan demikian orang yang menghindari hal-hal yang meragukan membersihkan dirinya sendiri sehubungan dengan agamanya dan penghormatannya, tetapi dia yang jatuh ke dalam masalah yang meragukan [akhirnya] jatuh ke dalam apa yang haram, seperti gembala yang padang rumput di sekitar tempat kudus, semua kecuali merumput di dalamnya. Sesungguhnya setiap raja memiliki tempat kudus, dan sungguh-sungguh tempat kudus Allah adalah larangan-Nya. Sesungguhnya di dalam tubuh ada sepotong daging, yang jika semuanya utuh, seluruh tubuh adalah utuh, dan jika penyakit itu berpenyakit, semua penyakit itu berpenyakit. Sesungguhnya, itu adalah hati."* [Bukhari & Muslim]

Telah dikemukakan bahwa keunggulan filsafat pemerintahan Al-Fārābī ini terletak pada tujuan pemerintahan yang hendak dicapai, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karna itu, peranan kepala pemerintahan sangat menentukan, yang tidak hanya ia berfungsi sebagai penyelenggara negara dalam urusan meterial rakyatnya, tetapi

ia juga berfungsi sebagai pendidik dan pengajar rakyatnya dalam urusan spiritual.¹⁶

Menurut al-Fārābī sebaiknya kepala negara ada atau diadakan terlebih dahulu. Lalu kemudian rakyat yang akan dikepalainya. Bukankah jantung itu terbentuk lebih dahulu, kemudian jantunglah yang merupakan sebab terbentuknya organ-organ tubuh itu serta tersusunnya urutan martabat masing-masing, dan jika terdapat organ yang tidak bekerja dengan baik atau rusak maka jantung memiliki fungsi untuk menghilangkan ketidak baikan atau kerusakan itu. Demikian juga halnya dengan kepala negara. Ia seyogyanya ada dahulu kemudian darinya terbentuk negara atau bagian-bagian atau rakyatnya, dan diapula yang menentukan wewenang, tugas dan kewajiban serta martabat atau posisi masing-masing warga negaranya. Dan jika terdapat warga negara yang tidak baik, kepala negara dapat menghilangkan ketidakbaikan itu. Dari teorinya bahwa al-Fārābī memang tidak bermaksud memperbaiki pola atau situasi politik yang ada, tetapi membayangkan untuk mencetak negara yang sama sekali baru, dan dari awal.¹⁷

¹⁶Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*,..., h. 86.

¹⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,..., h. 55.

Al-Fārābī. Ia lebih banyak menggeluti masalah moral, politik dan psikologi di bandingkan al-Kindi. Ia menghadapi secara tegas problematika qada dan qadar. Ia menggeluti tingkah-laku individu di samping serius mengatur urusan-urusan kemasyarakatan. Nampaknya ia merupakan kaum paripatetik arab yang paling serius mendalami sosiologi. Ia memfokuskan diri pada kebahagiaan, yang menurutnya merupakan tujuan tertinggi yang didambakan manusia yang bisa diraih hanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan terpuji melalui kehendak dan pemahaman yang diniati. Setiap orang akan bisa melakukan kebaikan dan meraih kebahagiaan jika hal itu dikehendakinya. Sebab, menurutnya kehendak merupakan sendi moral sekaligus sebagai sendi yang politik begitu menurut istilah dia juga ilmu madani. Yaitu ilmu yang meneliti tentang jenis-jenis perbuatan dan hukum-hukum volisional, bakat, moral, tabiat nilai tempat lahirnya perbuatan-perbuatan dan hukum-hukum ini. Sebab, moral dan politik menurut al-Fārābī berhubungan erat, karna *Madīnah Fāḍilah* (kota ideal) mirip sekali dengan kota-kota yang sempurna dan sehat yang masing-masing anggotanya saling membantu.¹⁸

¹⁸Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-fārābī dan Khomaeni*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 51.

Dari aspek psikologis, al-Fārābī berkonsentrasi untuk menjelaskan *'amal iradi* (aksi volisional). Untuk itu, ia membedakan *iradah* dari *ikhtiar*. Ia berpendapat bahwa iradah (kehendak) dilahirkan oleh rasa rindu dan keinginan yang dibangkitkan oleh rasa dan imajinasi. Seolah-olah ia merupakan pengertian kehendak ke dalam standar kecenderungan, karenanya dimungkinkan jatuh ke alam hewani. Akan tetapi di tempat lain ia berusaha untuk menganalisa tingkat-tingkat *'amal iradi*, yang kemudian di hubungkannya secara erat dengan *niat* dan *qasd*. Jelas bahwa niat mendahului, tidak bersamaan dengan aksi dan juga disebut *'azam yakni*, persoalan yang di simpan oleh hati bahwa anda akan melakukan hal itu. Sedangkan *Al-Qasd* (unsur kesengajaan) menurut al-Fārābī terjadi bersamaan dengan aksi. Baik *niat*, *'azam* maupun *Qasd* merupakan fenomena psikologis yang berlandaskan pada prinsip pemikiran dan analisa.

Nilai kehendak terletak pada kebebasannya. al-Fārābī telah menjelaskan bahwa manusia bisa berbuat baik jika ia berkehendak, karena ia bebas untuk mewujudkan apa yang ia kehendaki dan perbuat. Akan tetapi kebebasan ini tunduk kepada hukum-hukum alam, masing-masing diberi fasilitas sesuai dengan kejadiannya, perhatian Allah mencakup segala hal dan berhubungan dengan setiap orang, dan setiap

yang ada ini terjadi atas *qada* dan *qadar-Nya*. Mungkin faktor inilah yang mendorong De Boer untuk mengatakan bahwa al-Fārābī termasuk kelompok jabariah. Kami khawatir jika hal ini keterusan dalam menafsirkan perhatian tuhan menurut filosof kita ini, karena menurutnya perhatian tuhan adalah pengaturan kokoh dan universal yang tidak mengandung kontradiksi. Sebab, manusia mempunyai bidang sedangkan alam mempunyai sistem, di mana bidang manusia mempunyai bidang sedangkan alam mempunyai sistem, di mana bidang manusia tidak akan terwujud kecuali jika memenuhi persyaratan kehendak. Betapa hal ini mirip sekali dengan *harmonia pra stabilita* yang dikemukakan oleh Leibniz kira-kira tujuh abad setelah al-Fārābī. Pada periode berikutnya, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd akan menjelaskan secara lebih sempurna harmonia ini yang merupakan hubungan antara kebebasan manusia dengan perhatian tuhan.¹⁹

B. Tugas dan Fungsi Pemimpin dalam Negara Utama Al-Fārābī

Sesuai dengan teorinya bahwa penghuni negara itu terdiri dalam banyak kelas, al-Fārābī berpendapat bahwa tidak semua warga negaranya yang dapat dan boleh menjadi kepala negara utama hanyalah

¹⁹Yamani, *Filsafat Politik Islam Antara Al-fārābi dan Khomaeni*, ..., h. 85.

anggota masyarakat atau manusia yang paling sempurna, tentunya dari kelas yang tertinggi dibantu oleh orang-orang pilihan juga dari kelas yang sama. Mereka tunduk dibawah pimpinan negara, dan atas nama dia memimpin warga-warga dari kelas di bawahnya. Hal itu berarti bahwa warga-warga negara selain kepala negara tidak sama tingkatannya satu sama lain. Tinggi dan rendahnya tingkat mereka di tentukan oleh dekat dan jauhnya dari kepala negara.²⁰

Bagi al-Fārābī Pemimpin yang sesungguhnya ialah pemimpin yang tujuan utamanya dari segala apa yang dilakukan dapat memberi manfaat kepada diri dan para warga dalam meraih kebahagiaan, ini adalah tugas utama pemimpin, untuk itu pemimpin negara utama haruslah orang yang paling sejahtera karena ia akan menjadi sebab kesejahteraan kota.²¹

Al-Fārābī juga memahami bahwa seorang pemimpin juga harus sebagai orang yang di ikuti atau di terima, dalam arti diterima dengan alasan bahwa dia memiliki kesempurnaan tujuan apabila perbuatan-perbuatan keutamaan-keutamaan kreatifitas pemimpin tidak seperti yang dikehendaki oleh masyarakat, maka pemimpin tidak bisa diterima, dengan kata lain adalah pemimpin adalah orang yang paling

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,..., h. 55.

²¹ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, ..., h. 96-97.

utama, paling kreatif, dan memiliki tujuan yang paling utama, semua itu tidak mungkin terjadi apabila ia tidak memiliki ilmu-ilmu teoritis dan keutamaan berfikir.²²

Karena itu bagi al-Fārābī, agar semua komunitas memperoleh kebahagiaan sejati, maka dari itu pemimpin utama dalam melaksanakan tugasnya di negara utama bisa menggunakan dua metode yaitu pengajaran dan pembentukan karakter

Metode pengajaran dilakukan dengan memperkenalkan kebijakan teoritis dengan harapan orang dapat memahami teori-teori dan pelaksanaannya sesuai ketentuan teoritis normatif tersebut. Sedangkan pembentukan karakter adalah metode memperkenalkan kebijakan moral dan seni praktis dengan membiasakan bangsa dan penduduk untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersumber dari keadaan dan lingkungan sekitar yaitu dengan cara membangkitkan pada diri mereka tekad untuk melakukan tindakan-tindakan utama baik secara persuasif maupun paksaan.²³

Pemimpin utama adalah laksana seorang raja (simbolis) dalam kota negara utama dengan semua kawasan wilayah lainnya, pemimpin utama cenderung tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat materi,

²² Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, ..., h. 97-98

²³ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, ..., h. 98

pemimpin utama fokus pada satu tujuan utama yaitu mengabdikan diri pada rakyatnya. Jadi pemimpin utama bersifat falsafi.

fungsi kepala negara yang serupa dengan fungsi jantung (*al-qalb*) di dalam tubuh manusia. Kepala negara merupakan sumber suluruh aktivitas, sumber peraturan, dan keselarasan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti bertubuh sehat, berani, kuat, cerdas, pecinta pengetahuan serta keadilan, dan memiliki akal mustafad yang dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh, pengatur bumi, dan penyampai wahyu. Oleh karna itu, yang paling ideal sebagai kepala negara adalah Nabi/Rasul atau Filosof. Tugas kepala negara selain mengatur negara, juga sebagai pengajar dan pendidik terhadap anggota masyarakat yang di pimpinnya. Kalau tidak ada sifat-sifat kepala negara yang ideal ini, pimpinan negara di serahkan kepada seseorang yang memiliki sifat-sifat yang dekat dengan sifat-sifat yang dimiliki kepala negara ideal. Sekiranya sifat-sifat dimaksud tidak pula terdapat pada seseorang, tetapi terdapat dalam diri beberapa orang, maka negara harus diserahkan kepada mereka dan secara bersama harus beratu memimpin masyarakat.²⁴

²⁴Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*,..., h. 85.

Dari uraian di atas terlihat bahwa al-farabi dalam filsafatnya ini menekankan pemberdayaan manusia dalam satu negara sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya, warga negara harus rela berkorban untuk kepentingan berama dan juga untuk kepentingan negara. Dengan kata lain, saling membantu dan bekerja sama bukan hanya antarwarga negara, tetapi juga antar negara dan warganya. Dilihat dari sisi ini berarti al-Fārābī menepiskan bentuk negara kapitalisme dan sosialisme komunis.²⁵

C. Kriteria Kepala Negara dalam Negara Utama Al-Fārābī

Menurut al-Fārābī kepala bagi negara yang utama itu haruslah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang memiliki dua belas kualitas luhur yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sewaktu lahir sebagai watak yang alami atau tabiat yang fitri, tetapi sebagian yang lain masih perlu ditumbuhkan melalui pengajaran yang terarah, pendidikan serta latihan yang menyeluruh, dengan disiplin yang ketat, oleh karenanya pembinaan dan pembentukan pribadi calon-calon pemimpin melalui pengajaran, pendidikan, pengamatan dan pengawasan amat diperlukan. Bagi al-Fārābī, pemimpin negara itu bolehlah seorang filusuf yang mendapatkan kemakrifatan atau kearifan

²⁵Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam, Filosof dan Filsafatnya*,..., h. 85.

melalui pikiran dan rasio dan dapat juga seorang nabi yang mendapat kebenaran lewat wahyu. Adapun dua belas kualitas leluhur itu ialah:²⁶

1. Lengkap anggota badannya

Seorang kepala negara haruslah lengkap anggota badannya, sehat, dan tidak cacat. Karena dengan anggota badan yang sempurna memudahkan pemimpin untuk melakukan pekerjaan. Selain lengkap pemimpin harus sehat anggota badan karena dengan berbadan sehat pemimpin bisa memberi keputusan yang baik pula.²⁷

2. Baik daya pemahamannya

Seorang pemimpin harus mempunyai pemahaman yang baik, sehingga dia dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negaranya. Dia dapat membaca persoalan yang terjadi dan bahkan yang akan terjadi dan dia harus mampu memecahkan persoalan sesuai dengan harapan.²⁸

3. Tinggi Intelektualisasi

Seorang pemimpin jika menghadapi permasalahan dia akan memecahkan permasalahan itu dengan bukti, ia akan cepat tanggap

²⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,..., h. 56.

²⁷ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*,..., h. 81

²⁸ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*,..., h. 62

dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.²⁹ Untuk itu penting bagi seorang pemimpin mempunyai intelektualitas tinggi karena dalam memimpin sebuah negara pemimpin adalah orang yang pertama yang harus dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, baik politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

4. Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya

Di dalam mengemukakan pendapat atau di dalam hal berbicara seorang pemimpin akan baik dan mudah di mengerti oleh rakyatnya

5. Pencinta pendidikan dan gemar mengajar

Al-Fārābī berpandangan bahwa kota utama adalah kota yang diperintah oleh penguasa tertinggi yang benar-benar memiliki berbagai ilmu dan setiap jenis pengetahuan, ia mampu memahami dengan baik segala apa yang harus dilakukan. Ia mampu membimbing dengan baik sehingga orang mampu melakukan apa yang telah diperintahkannya. Ia mampu memberdayakan orang-orang yang memiliki kemampuan, ia mampu menentukan,

²⁹Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, ..., h. 64

mendefinisikan, dan mengarahkan tindakan-tindakan ini kearah kebahagiaan.

6. Tidak rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita.

Apa yang diminum, di makan, dan dinikmati di peroleh melalui jalan yang baik, secara natural terhindar dari sifat senang bermain-main (berfoya-foya), dan dia benci terhadap kenikmatan kenikmatan seperti itu.

7. Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan

Mencintai kejujuran dan orang yang berbuat jujur, membenci kebohongan dan orang yang berbuat bohong.

8. Berjiwa besar dan berbudi luhur

Menyukai pekerjaan-pekerjaan terhormat berjiwa besar terhadap masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang menimpa dirinya yang secara otomatis akan meningkatkan derajatnya kepada yang lebih tinggi.

9. Tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain memandang bahwa segala sesuatu yang berbau duniawi dianggap remeh baginya.

10. Pencinta keadilan dan pembenci perbuatan dzalim

Mencintai keadilan dan orang-orang yang berbuat adil, membenci kedzaliman dan aniaya beserta pelakunya.³⁰

11. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor.

Tidak sulit untuk melakukan yang di yakini benar dan harus dilakukannya. dia melakukannya dengan penuh keberanian, maju terus, tidak takut resiko, dan tidak lemah jiwanya.

12. Kuat pendirian dalam hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

Manusia yang memiliki kriteria seperti diatas, menurut al-Fārābī, akan mampu memahami dengan baik segala sesuatu yang harus dikerjakan. Ia mampu membimbing dengan baik sehingga orang-orang melakukan apa yang di perintahkan. Ia mampu memanfaatkan orang-orang bertalenta dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Iajuga mampu menentukan, mendefinisikan, dan mengarahkan

³⁰ Al-Fārābī, *Ārā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah*, ..., h. 116

tindakan-tindakan setiap orang untuk mencapai kesempurnaan, dan kebahagiaan.³¹

Syarat-syarat tersebut sebenarnya sukar terwujud sama-sama pada diri seseorang seperti yang diakui oleh al-Fārābī sendiri. Meskipun demikian al-Fārābī tidak segan-segan untuk menambah syarat lain lagi yang sejalan dengan corak umum filsafat dan tasawufnya. Dengan adanya syarat tambahan ini, maka al-Fārābī menjauh dari Plato dan mendekatkan diri kepada ajaran-ajaran Islam. Syarat tersebut ialah bahwa kepala negeri utama harus bisa meninggi untuk mencapai Akal Faal yang menjadi sumber wahyu dan ilham baginya. Sebagaimana dimaklumi Akal Faal merupakan salah satu sepuluh dan yang berpengaruh terhadap peristiwa-pristiwa yang terjadi dalam alam ini. Akal Faal juga sumber penghubung antara manusia dengan Tuhan dan menjadi hukum dan aturan yang diperlukan untuk kehidupan akhlak sosial.³²

Nampaknya dalam persoalan Akal-Faal ini, daya khayal al-Fārābī lebih subur dari pada Plato. Plato menghendaki agar filosof

³¹ Humaedi, *Pradigma Sains Integratif Al-Fārābī*, (Jakarta: Sadra Perss, 2015), h. 111.

³² Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996) cet-6, h. 97.

yang menjadi kepala Republiknya turun dari alam renungan untuk menuju kepala dunia politik, maka kepala negeri utama dari al-Fārābī harus masuk dalam alam rohaninya dari pada kehidupan jasmaninya, di samping harus dapat berhubungan terus-menerus dengan Akal-Faal. Dengan perkataan lain, penguasa filosof yang dikonsepsikan oleh Plato setelah beralih kepada al-Fārābī menjadi seorang hakim (yang bijaksana) yang dapat berhubungan terus-menerus.

Menurut De Boer: Al-Fārābī telah dapat menonjolkan sifat-sifat kemanusiaan dan kefilosof-an pada diri kepala negrinya. Jadi al-Fārābī adalah Plato yang memakai baju agama Islam.

Kepala negri yang dikemukakan oleh al-Fārābī, sebagai orang yang telah memperoleh kebahagiaan hakiki dan senang berhubungan dengan alam rohani tentu dapat menarik rakyatnya kepada dirinya dan mendidik jiwa serta membawanya naik ke alam cahaya yang cemerlang. Dengan demikian, maka kita disodori sesuatu negri, dimana penduduknya terdiri dari orang-orang suci semua sedangkan kepala negaranya adalah seorang Nabi. Hal ini dikarnakan kenabian di pandangan al-Fārābī, bukanlah sesuatu di luar jangkauan manusia dan

bukan pula merupakan hal yang luar biasa dia adalah sebagai fenomena sebagaimana fenomena alam lainnya.

Nabi adalah seorang manusia yang daya khayalnya telah mencapai kepada kesempurnaan. Daya khayal ini dalam pandangan al-Fārābī memegang peranan penting. Ia menghimpun bentuk-bentuk yang berasal dari luar pandangan indriawi. Ia meramu susunan bentuk-bentuk itu unuk memunculkan bentuk-bentuk baru di alam indriawi dan alam nyata. Hal yang penting dari itu semua adalah bahwa nabi memiliki daya kemampuan untuk selalu berhubungan dengan alam tertinggi inilah yang disebut dengan mimpi yang benar dalam sebuah pemikiran kenabian³³

Negeri seperti ini sudah barang tentu hanya berada di dalam khayal al-Fārābī saja, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pikiran-pikiran al-Fārābī lebih banyak bersifat teori sajadari pada bersifat realistik pragmatif, karena ia memang hanya seorang ahli pikir yang dalam dan punya penalaran yang luas.³⁴

Pemikiran al-Fārābī memiliki fondasi dan akar pada pencairan dan penyandaran kebenaran kepada Tuhan kaitannya dengan semua

³³Humaedi, *Pradigma Sains Integratif Al-Fārābī*,..., h. 112.

³⁴Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*,..., h. 97.

realitas, alam, dan manusia. Ilmu politik dengan bantuan metafisika dalam perspektif al-Fārābī menunjukkan jalan pendakian bertahap dari persepsi dunia fisik dan prinsip-prinsipnya menuju pada realitas spritual, yaitu prinsip segala sesuatu yang ada. Ilmu ini mengajarkan manusia sebagai anggota masyarakat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik mengenai tujuan akhir hidupnya.³⁵

³⁵ Humaedi, *Pradigma Sains Integratif Al-Fārābī*, ..., h. 112.